

## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang diucapkan oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia merupakan tonggak sejarah berdirinya negara Republik Indonesia dan merupakan babak baru sejarah bangsa Indonesia setelah lama berada di bawah penjajahan bangsa asing. Pernyataan kemerdekaan Indonesia tersebut mencerminkan kuatnya keinginan bangsa Indonesia untuk mengatur negara sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Paska pernyataan kemerdekaan, langkah awal yang dilakukan para pendiri bangsa Indonesia adalah menyusun konstitusi negara sebagai sumber hukum ketata negaraan. Melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), maka pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut.

Masalah selanjutnya yang dihadapi bangsa Indonesia paska proklamasi adalah mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan tersebut dilakukan karena adanya pihak-pihak yang tidak ingin berdirinya Negara Republik Indonesia, baik dari luar bangsa Indonesia maupun dari lingkungan internal bangsa Indonesia sendiri. Tantangan

eksternal yang dihadapi bangsa Indonesia adalah keinginan pemerintah Belanda melalui tentara sekutu untuk kembali menguasai dan meneruskan penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Untuk menghadapi tantangan eksternal tersebut usaha mempertahankan proklamasi kemerdekaan dilakukan melalui diplomasi dalam bentuk perundingan, misalnya perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada tanggal 12 November 1946.

*“Bersamaan dengan penarikan pasukan Inggris, tentara Belanda mulai mendarat di Jawa dan Sumatera pada April 1946. Sebelum mneraik diri Inggris berhasil memaksa Belanda untuk mengadakan perundingan guna mengakhiri pertempuran dengan RI. Hasilnya adalah Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 12 November 1946. Perjanjian Linggarjati membentuk kesepakatan bahwa Belanda akan mengakui kedaulatan RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua belah pihak berjanji akan bekerjasama membentuk Republik Indonesia Serikat yang berdaulat, demokratis, dan federal di bawah naungan Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Belanda”. (Nino Oktorino, 2009: 216).*

Penyelesaian tantangan eksternal melalui jalur diplomasi dan perundingan banyak menemui rintangan dari kalangan internal bangsa Indonesia sendiri yang ditandai oleh jatuhnya kabinet Syahrir. Pada sisi lain tentara Belanda juga melakukan pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati dengan agresi militer yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 1947. Oleh karena itu, selain melalui jalan perundingan, usaha mempertahankan kemerdekaan dari serangan eksternal juga dilakukan melalui jalan perang atau konfrontasi.

Dampak penyelesaian konfrontasi dengan tentara Belanda adalah munculnya simpati dunia internasional atas perjuangan Tentara Republik Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Dukungan dunia internasional melalui Komisi Jasa Baik PBB memaksa Republik Indonesia dan Belanda melakukan

perundingan di atas kapal Amerika Serikat USS Renville, sehingga perundingan itu disebut perundingan Renville.

“Australia dan India meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera campur tangan guna mengakhiri permusuhan. Dengan dukungan AS, Komisi Jasa baik PBB berhasil mengajak Indonesia dan Belanda untuk berunding di atas kapal milik AS USS Renville yang berlabuh di teluk Jakarta. Pada 17 Januari 1948, setelah melalui perundingan alot kedua belah pihak menandatangani kesepakatan yang disebut Perjanjian Renville. Isi Perjanjian Renville memuat pengakuan de facto atas republik Indonesia dan mengatur peralihan Uni Indonesia-Belanda. Selain itu diakui adanya “Garis Van Mook” yaitu batas wilayah Indonesia yang diduduki Belanda berdasarkan hasil aksi agresi I” (Nino Oktorino, 2009: 217).

Perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia berdampak luas pada ketidaksetujuan terhadap penyelesaian konflik antara Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda melalui jalur diplomasi. Ketidak setujuan atas perjanjian Renville juga memunculkan keinginan kelompok-kelompok tertentu untuk mendirikan negara dengan ideologi dan dasar yang lain. Misalnya pemberontakan bersenjata Partai Komunias Indonesia di bawah pimpinan Musso pada tahun 1948 di Madiun yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis di Indonesia.

Selain kelompok komunis yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis, kelompok Islam juga ingin merubah ideologi Pancasila dengan ideologi Islam bahkan memunculkan keinginan adanya bentuk negara Islam di Indonesia. Apabila ditelusuri ke belakang, jauh sebelum pernyataan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 keinginan pembentukan Negara Islam di Indonesia sudah muncul dengan berdirinya Partai Sarikat Islam oleh Hadji Oemar Said Tjokro Aminoto yang menggunakan Islam sebagai dasar perjuangan. Setelah wafatnya Hadji Oemar

Said Tjokro Aminoto perjuangan pembentukan Negara Islam Indonesia juga diteruskan oleh tokoh-tokoh Islam lainnya, seperti Abi Kusno, Agus Salim, Wachid Hasyim.

Keinginan pembentukan Negara Islam Indonesia secara konstitusional sudah dilaksanakan oleh tokoh-tokoh Islam pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia melalui sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terjadi pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam masa sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ini persoalan dasar negara merupakan pembicaraan yang memakan waktu panjang. Tokoh-tokoh Islam menginginkan negara Indonesia menggunakan syariat Islam sebagai dasar dan idiologi negara, sementara tokoh lain menginginkan Pancasila sebagai dasar idiologi negara. Melalui panitia sembilan, akhirnya berhasil menetapkan Piagam Jakarta dengan Pancasila ~~tetap~~ sebagai dasar negara dengan bunyi sila pertama “ Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.

Setelah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang pertamanya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi resmi negara Republik Indonesia. Perubahan mendasar dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terhadap Piagam Jakarta, yaitu dihilangkannya tujuh kata pada sila pertama dalam Piagam Jakarta. Sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi

“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penghilangan tujuh kata tersebut mengecewakan tokoh-tokoh Islam Indonesia.

Apabila dilihat dari sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) perjuangan pembentukan Negara Islam Indonesia dilakukan melalui jalan konstitusional, yaitu diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Islam yang tergabung dalam BPUPKI dengan memasukkan syariat Islam sebagai dasar negara meskipun secara konstitusional dianggap gagal sehingga mengecewakan kelompok pergerakan Islam Indonesia.

Selain secara konstitusional, pembentukan Negara Islam Indonesia juga dilakukan secara inkonstitusional melalui gerakan konfrontasi. Langkah konfrontasi dalam pembentukan Negara Islam Indonesia dilakukan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Sebelum gerakan konfrontasi dipilih, ide pendirian Negara Islam Indonesia oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebenarnya sudah banyak disampaikan melalui kongres-kongres Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), contohnya adalah pemikiran tentang sikap hijrah Partai Sarikat Islam Indonesia, pada tahun 1936 dan program aksi hijrah pada tahun 1937. Dapat dikatakan bahwa Kartosoewirjo menggunakan Partai Sarikat Islam Indonesia sebagai wadah untuk menyampaikan ide-ide pembentukan Negara Islam Indonesia. Selain melalui partai tersebut, Kartosoewirjo juga menggunakan Partai Masyumi sebagai wadah perjuangan.

Gerakan konfrontasi yang dilakukan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia dilandasi oleh kekecewaan dan

ketidak setujuan terhadap pemerintah Republik Indonesia atas perjanjian Renville setelah terjadinya agresi Belanda ke wilayah Republik Indonesia. Dalam perjanjian Renville 17 Januari 1948, menyatakan bahwa Belanda memiliki kedaulatan atas Indonesia sebelum dibentuk Negara Indonesia Serikat dengan Indonesia sebagai negara bagian dari Republik Indonesia Serikat bentukan Belanda. Berdasarkan perjanjian tersebut, maka wilayah Republik Indonesia menjadi lebih sempit, sehingga anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jawa Barat yang dianggap sebagai wilayah Belanda harus dipindahkan ke Jawa Tengah.

**“Persetujuan yang diadakan antara delegasi Belanda dan delegasi Republik Indonesia, yang menyangkut masalah peletakan senjata dalam konflik antara Indonesia dan Belanda. Persetujuan berisi perbagai macam ketentuan dan syarat mengenai pelaksanaan gencatan senjata dan beberapa pasal sebagai dasar perundingan politik, kedaulatan Belanda di Indonesia sebelum terbentuknya Negara Indonesia Serikat dan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara bagian. (Ensiklopedi Indonesia, 1988: 2883).**

Perpindahan anggota TNI dari Jawa Barat ke Jawa Tengah tersebut menyebabkan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo menganggap adanya kekosongan pemerintahan dan tentara di wilayah Jawa Barat. Kekosongan pemerintahan dan tentara di wilayah Jawa Barat tersebut dimanfaatkan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo untuk memproklamkan Negara Islam Indonesia di wilayah Jawa Barat. Proklamasi Negara Islam Indonesia oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dilakukan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya Jawa Barat.

Pada tanggal 7 Agustus 1949, bertepatan dengan 12 Syawal 1368 H, di Desa Cisampang, Kecamatan Cilugalar, Kawedanan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, S.M. Kartosoewirjo bersama pengikutnya memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) dengan Kartosoewirjo sebagai presidennya (Ade Firmansyah, 2011: 18-19).

Proklamasi Negara Islam Indonesia tersebut terjadi di tengah-tengah agresi Belanda ke wilayah Indonesia, dan setelah terjadi pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Pemerintah Belanda maka Kartosoewirjo dengan Negara Islam Indonesiannya diminta untuk kembali bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi Kartosoewirjo menolak ajakan kembali ke Republik Indonesia. Perselisihan antara pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno pada masa itu tidak hanya dengan Kartosoewirjo tetapi juga dengan Daud Baurueh di Aceh yang menyatakan memisahkan diri dari Republik Indonesia dan ikut dengan Negara Islam Indonesia Kartosoewirjo. Demikian juga Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Amir Fatah di Jawa Tengah dan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan menyatakan ikut menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia Kartosoewirjo.

Peristiwa tersebut akhirnya memaksa pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil sikap tegas terhadap Kartosoewirjo dengan Negara Islam Indonesia yang didirikannya. Konfrontasi antara Kartosoewirjo dengan Pemerintah Republik Indonesia dan keengganan Kartosoewirjo untuk menyerahkan diri kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka gerakannya dianggap sebagai pemberontakan yang harus dibasmi. Konfrontasi tersebut terjadi hampir 13 tahun lamanya sampai tertangkapnya Kartosoewirjo oleh pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan ditangkap dan dihukum matinya Kartosoewirjo pada tahun 1962, maka Negara Islam Indonesia dengan sendirinya bubar.

Berdirinya Negara Islam Indonesia (NII) di awal masa kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, merupakan salah satu peristiwa penting yang membekas dalam catatan sejarah panjang Republik Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dari rongrongan internal bangsa Indonesia. Dalam peristiwa sejarah tersebut, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo adalah tokoh pemberontak yang gagal mendirikan negara di wilayah Republik Indonesia melalui jalan konfrontasi.

## B. Analisis Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- 1) Peranan organisasi pergerakan Islam dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari kolonial Belanda.
- 2) Peranan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo sebagai pendiri Negara Islam Indonesia.
- 3) Faktor-faktor yang mendorong munculnya cita-cita pembentukan Negara Islam Indonesia.
- 4) Usaha yang dilakukan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia.

### 2. Pembatasan Masalah

Luasnya masalah dalam penelitian ini dan dikarenakan keterbatasan waktu, daya dan kemampuan peneliti maka masalah penelitian ini dibatasi pada usaha-usaha Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia di wilayah Republik Indonesia.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan “Usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia?”.

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Menambah wawasan dan pemahaman kepada pembaca umumnya dan khususnya peneliti tentang Negara Islam Indonesia.
- 2) Menambah pengetahuan tentang usaha-usaha Sukarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia.

- 3) Memberikan sumbangan pemikiran kepada guru mata pelajaran sejarah khususnya bahan kajian sejarah perjuangan bangsa.
- 4) Memberikan informasi kepada pihak lain yang ingin meneliti pada masalah yang sama.

#### E. Ruang Lingkup Penelitian

##### 1. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada pendirian Negara Islam Indonesia oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo.

##### 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah usaha-usaha Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dalam mendirikan Negara Islam Indonesia.

##### 3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Negara Islam Indonesia Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dengan temporal waktu tahun 1946 sampai tahun 1949.

##### 4. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2012.

##### 5. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di

- 1) Perpustakaan Universitas Lampung,
- 2) Perpustakaan Daerah Lampung.

